



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

....., Tempat Lahir di Sumatera, tanggal 18 Agustus 1972, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Kelurahan Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

....., Tempat Lahir di Sirisori Islam, tanggal 06 July 1973, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan, Hollo Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya, Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 1 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Pen. No.32/Pdt.P/2020/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Hollo, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Mei 1997 secara syariat Islam.
 2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 7 (tujuh) Orang Anak bernama :
 - a. M. Ananita, Laki-Laki, Umur 21 Tahun
 - b. Ala, Perempuan, Umur 20 Tahun
 - c. Santi, Perempuan, Umur 18 Tahun
 - d. Sarti, Perempuan, Umur 15 Tahun
 - e. Idris, Laki-Laki, Umur 13 Tahun
 - f. Kawa, Laki-Laki, Umur 10 Tahun
 - g. Indah, Perempuan, Umur 7 Tahun
 3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Arifin Holle selaku Penghulu Masjid Hollo dan yang menjadi Wali Nikah adalah Muhammad Sanaky (ayah kandung) dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- dibayar tunai.
 4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Arifin Holle dan Motalip Kaplale.
 5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis.
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumahtangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah.
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Pen. No.32/Pdt.P/2020/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1997, di Hollo, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa perubahan yang selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 1997 yang dilaksanakan di Hollo, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Sanaky dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arifin Holle.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Arifin Holle dan Mutalip Kaplale.
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp. 10.000,-
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.

Hal. 3 dari 10 Pen. No.32/Pdt.P/2020/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan dikaruniai 7 (tujuh) Orang Anak.
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya guna pengurusan buku nikah.
2., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 10 Mei 1997 yang dilaksanakan di Hollo, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Sanaky dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arifin Holle.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Arifin Holle dan Mutalip Kaplale.
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp. 10.000,-
 - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan dikaruniai 7 (tujuh) Orang Anak.
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Hal. 4 dari 10 Pen. No.32/Pdt.P/2020/PA.Msh



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya guna pengurusan buku nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Hollo, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Mei 1997, dengan wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Sanaky dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arifin Holle, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 10.000,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Arifin Holle dan Mutalip Kaplale, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu dan yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Hal. 5 dari 10 Pen. No.32/Pdt.P/2020/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 1997 di Hollo, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Sanaky dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arifin Holle, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 10.000,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Arifin Holle dan Motalip Kaplale.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak

Hal. 6 dari 10 Pen. No.32/Pdt.P/2020/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1997 di Hollo, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Sanaky dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arifin Holle, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 10.000,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Arifin Holle dan Mutalip Kaplale sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa tidak terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat

Hal. 7 dari 10 Pen. No.32/Pdt.P/2020/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1997 di Hollo, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Sanaky dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arifin Holle, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 10.000,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Arifin Holle dan Mutalip Kaplale, sehingga dengan demikian alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1997 di Hollo, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah ditujukan agar tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi yang dibuktikan dengan buku nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bernilai *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah.

Hal. 8 dari 10 Pen. No.32/Pdt.P/2020/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang dalam Program Isbat Nikah Terpadu ini ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1997 di Hollo, Desa Hollo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Hal. 9 dari 10 Pen. No.32/Pdt.P/2020/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah sejumlah Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Desa Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 H., oleh Hakim Rifyal Fachri Tatuhey S.HI. M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Halim Tuasikal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Rifyal Fachri Tatuhey S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim Tuasikal, S.HI

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 10.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). |

Hal. 10 dari 10 Pen. No.32/Pdt.P/2020/PA.Msh